

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi, dunia semakin berkembang dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang baru muncul. Hal ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, salah satu komponen yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah laporan keuangan (Pratama & Pujiati, 2015).

Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan jujur kepada pengguna laporan keuangan. Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Verya et al., 2016).

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi (Saksakotama, 2014).

Hardiningsih (2010), integritas adalah jujur dan apa adanya. Laporan keuangan yang memiliki integritas adalah laporan keuangan yang menampilkan

kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembuyikan. Integritas laporan keuangan adalah kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bias serta secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan.

Dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembuyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang *overstate* akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut (Savero, 2017).

Zhou dan Yang (2016) menyatakan secara intuitif ukuran integritas laporan keuangan dapat dibagi menjadi 2 yakni diukur secara konservatisme atau manajemen laba. Meski demikian, pihak auditor lebih tertarik pada pelaporan keuangan yang bersifat konservatif (Jiazhen dan Kun, 2016) . Hal ini disebabkan karena karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme dapat digunakan untuk memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan.

Selain itu, Indeks konservatisme digunakan dengan alasan keidentikan konservatisme yang menyajikan laporan keuangan yang *understate* yang memiliki risiko lebih kecil dibanding laporan keuangan yang *overstate*.

Sehingga prinsip konservatisme dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan (Fajaryani, 2015).

Konservatisme merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan ketika adanya kemungkinan rugi atau penurunan aset (peningkatan kewajiban) segera diungkapkan. Namun ketika kemungkinan terjadi laba atau peningkatan aset (penurunan kewajiban) perusahaan menunda untuk mengungkapkan. Dengan adanya penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh penyusun. Hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Riri, 2014).

Menurunnya integritas laporan keuangan perusahaan, memicu terjadinya manipulasi informasi akuntansi yang secara langsung melibatkan *Chief Executive Officer* (CEO), komisaris, komite audit, internal auditor hingga eksternal auditor) (Nicolin dan Sabeni, 2013). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak diterapkan dengan baik. Di Indonesia sendiri, perbincangan mengenai *corporate governance* masih menjadi isu yang hangat. Terutama sejak terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia, dan menjadi perhatian akibat terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan. Terbukti banyak

sekali terjadi kasus-kasus manipulasi informasi akuntansi laporan keuangan (Yulinda et al., 2016).

Seperti kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Kasus berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar US\$809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun 2017 yang menderita rugi US\$ 216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan standar PSAK. Pasalnya Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki hutang padahal hutang belum dibayarkan (economy.okezone.com).

Fenomena ini jelas menunjukkan dapat terjadinya manipulasi informasi akuntansi sebagai kegagalan dari integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan tersebut. Laba sebagai bagian laporan keuangan tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya tentang kondisi perekonomian perusahaan sehingga laba yang diharapkan memberi informasi untuk mendukung keputusan ekonomi menjadi diragukan kualitasnya.

Pada dasarnya, belum adanya tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor utama yang memicu banyaknya penyalahgunaan otoritas oleh direktur ataupun petinggi-petinggi lain dalam perusahaan (Singdevh dan Desai,

2016). Perusahaan yang belum memiliki tata kelola yang baik dapat memicu manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang hanya berdampak positif bagi ekonomi perusahaan demi menghindari turunnya kredibilitas perusahaan dihadapan publik. Namun, hal ini justru dapat merugikan pihak pengguna laporan keuangan karena informasi yang disajikan bukanlah informasi yang transparan dan sebenarnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rezaee, 2004) dan (Habib, 2015) yang menyatakan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dalam penelitian ini struktur *corporate governance* diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen.

Salah satu faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar negeri (Savero, 2017).

Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga integritas laporan keuangan terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pengawasan tersebut maka manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan

mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Irawati, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Vera et al., 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan. Karena tingginya saham yang dimiliki oleh instansi luar maka bisa dilihat pula perusahaan itu mempunyai nama yang besar. Perusahaan yang besar kemungkinan besar akan menjaga nama baiknya dimata investor atau instansi luar. Maka dari itu integritas laporan keuangan akan stabil. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulinda et al., 2016), (Savero, 2017) dan (Pratama & Pujiati, 2015) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawati, 2016), (Priharta, 2017) dan (Saksakotama, 2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana & Herawaty, 2007).

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik

kinerja perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab manajemen yang lebih besar dalam menjalankan amanah untuk mengelola perusahaan (Istiantoro et al., 2018).

Penelitian (Arista, 2018), (Rizki, 2018), (Savero, 2017) dan (Istiantoro et al., 2018) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan membuat manajemen memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola perusahaan dan menyajikan informasi yang benar dan jujur untuk kepentingan pemegang saham dan dirinya sendiri. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan (Pratama & Pujiati, 2015), (Octavia, 2013), dan (Fajaryani, 2015) menyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah komite audit. Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Dibentuknya komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal, penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta mengevaluasi, menilai dan memutuskan apakah sebuah laporan keuangan layak diterbitkan atau tidak. Semakin banyak jumlah komite audit akan semakin besar tekanan kepada manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas (Yulinda et al., 2016).

Penelitian (Istiantoro et al., 2018) menyatakan Komite Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Sejalan

dengan penelitian yang dilakukan (Arista, 2018), (Yulinda et al., 2016) dan (Pratama, 2015). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah anggota komite audit mampu mengurangi konflik agensi yang timbul akibat hubungan keagenan. Jumlah anggota komite audit yang besar mampu mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai nilai perusahaan yang tinggi dengan cara menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi dapat tercapai. Sedangkan penelitian (Irawati, 2016), (Setiawan, 2016) dan (Saksakotama, 2014) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Komisaris independen juga merupakan faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Komisaris independen merupakan suatu badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Rizki, 2018).

Penelitian (Octavia, 2013), (Savero, 2017), (Priharta, 2017), dan (Saksakotama, 2014) menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Komisaris independen dapat berperan sebagai penengah apabila terjadi perselisihan diantara para manajer internal serta mengawasi kebijakan-kebijakan dan memberikan nasihat kepada manajer. Sedangkan penelitian (Istiantoro et al., 2018), (Rizki, 2018), dan (Setiawan, 2016)

menyatakan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan ataupun penurunan jumlah proporsi anggota komisaris independen tidak mempengaruhi tinggi rendahnya integritas laporan keuangan dan tidak mampu mengurangi konflik agensi yang timbul akibat hubungan keagenan. Jumlah komisaris independen yang besar ataupun kecil tidak mampu mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai nilai perusahaan dengan cara menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi ataupun rendah tidak dapat tercapai.

Belum adanya titik temu dari hasil penelitian di atas menyebabkan penelitian ini masih menarik dan relevan untuk diteliti. Selain itu hasil yang berlawanan di atas menarik perhatian untuk menguji ulang apakah struktur *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Silvia Arista (2018). Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian acuan yaitu pada variabel yang diteliti. Dan perbedaan lainnya yaitu pada objek yang diteliti penelitian Silvia Arista (2018) meneliti seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur sub sektor Industri Barang Konsumsi. Dan perbedaan lainnya lagi yaitu pada periode

penelitian. Penelitian Silvia Arista (2018) meneliti dari tahun 2015-2017, sedangkan penelitian ini meneliti dari tahun 2015-2019.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan?

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini menggunakan struktur *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen sebagai variabel independen karena dianggap merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan. Penelitian tentang laporan keuangan ini dilakukan dengan menguji laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
- d. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Akademisi

Menambah literatur, pengembangan ilmu akuntansi dan acuan penelitian pada bidang akuntansi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai integritas laporan keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan jalannya struktur *corporate governance* dalam operasional perusahaan guna meningkatkan integritas laporan keuangan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang integritas laporan keuangan serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya auditing dan akuntansi manajemen dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.

